

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tugas dan kewajiban pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, secara tegas telah dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, bahwa pemerintah negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pernyataan tersebut memberi arti bahwa pemerintah mempunyai peranan sentral baik sebagai perencana, penggerak, pengendali, dan pengawas dalam pelaksanaan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat agar bisa dinyatakan sebagai pemerintah yang baik dalam memberikan pelayanan.

Kepemerintahan yang baik merupakan suatu tindak lanjut atau evolusi penyelenggaraan pemerintahan dari perubahan pemerintahan yang baik dalam suatu bentuk pemerintahan. Kepemerintahan yang baik ini cenderung lebih efektif dan efisien dalam proses dan tujuannya sehingga dikategorikan sebagai suatu proses pemerintahan yang baik diterapkan di semua negara karena kepemerintahan yang baik bisa menyeimbangkan keselarasan pemerintah dengan pihak lain di berbagai sektor untuk menciptakan suatu keteraturan di dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam rangka membangun kualitas kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien, diperlukan waktu untuk memikirkan bagaimana mencapai kesatuan, kerjasama sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk itu, diperlukan otonomi serta kebebasan dalam mengambil keputusan mengalokasikan sumber daya, membuat pedoman pelayanan, anggaran, tujuan, serta target kinerja yang jelas dan terukur. Pemerintah daerah dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public harus pula diiringi dengan penerapan prinsip kepemerintahan yang baik. kepemerintahan yang baik merupakan proses

penyelenggaraan kekuasaan dalam menyediakan barang dan jasa public. Prinsip-prinsip dari pemerintahan yang baik adalah prinsip efektifitas, keadilan, Partisipasi, Akuntabilitas, dan tranparansi. Pada sisi lain, pemerintah daerah atau lokal sebagai lembaga negara yang mengemban misi pemenuhan kepentingan publik dituntut pula pertanggungjawaban terhadap publik yang dilayaninya, artinya pemerintah lokal harus menjalankan mekanisme pertanggungjawaban atas tindakan dan pekerjaannya kepada publik yang sering disebut menjalankan prinsip akuntabilitas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan dalam menggunakan dan melaksanakan kewenangan politik, ekonomi dan administratif dapat diselenggarakan dengan baik. Oleh sebab itu dalam prakteknya, konsep Pemerintahan yang baik harus ada dukungan komitmen dari semua pihak yaitu negara/pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintahan yang baik merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Pulau Sabu termasuk salah satu wilayah kepulauan di Indonesia dan berada di Kabupaten Sabu-Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Tiga pulau yang masuk dalam wilayah kepulauan Sabu-Raijua yaitu; Pulau Sabu, Raijua dan Dana. Pulau Dana termasuk dalam daftar pulau terluar di wilayah Indonesia. Dari ketiga pulau tersebut hanya Pulau Sabu dan Raijua yang berpenghuni. Sumber daya alam dominan yang ada di Kepulauan Sabu, dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat adalah komoditi pertanian lahan kering seperti padi, jagung, kacang-kacangan, dan pohon lontar yang disadap untuk diolah menjadi gula sebagai sumber karbohidrat utama. Kebiasaan masyarakat lokal menggantikan sumber karbohidrat dari jagung, ubi dan beras dengan gula lontar yang dicampur dengan air dan diminum sudah menjadi tradisi turun temurun. Hal ini dapat membuat mereka bertahan tanpa mengkonsumsi sumber karbohidrat

---

<sup>1</sup> Tejasinarta, I ketut 2016, Analisis Rendahnya Pendapatan petani Rumput Laut Di Desa Batununggul (Sebuah Kajian Persepektif Dari Sosial Ekonomi), singaraja, hal. 66

lain untuk melakukan aktivitas harian yang berat. Selain itu potensi sumber daya laut dan pesisir yang ada di kepulauan ini seperti perikanan dan *mariculture* belum dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan yang menguntungkan. Jenis-jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti kakap, karapu dan lainnya hasil penangkapan nelayan tradisional dijual dengan nilai 20% dari harga pasar. Jenis sumber daya *mariculture* yang dibudidayakan sejak tahun 2003 di kepulauan ini yaitu rumput laut.<sup>2</sup>

Pemanfaatan rumput laut secara ekonomis sudah dilakukan oleh masyarakat Sabu Raijua umumnya dan khususnya dikelurahan Ledeke Kecamatan Raijua. Komoditi ini berkembang cukup baik dengan harga kecenderungan fluktuatif. Rumput laut membawa manfaat yang cukup baik bagi masyarakat/petani rumput laut sehingga membawa perubahan bagi perekonomian petani rumput laut dikelurahan Ledeke Kecamatan Raijua Kabupaten Sabu Raijua.

Namun petani rumput laut banyak mengalami kendala. Oleh karena itu, sangat mengharapkan bahwa dari pemerintah kelurahan program pemberdayaan baik dalam bentuk peralatan-peralatan, bantuan sarana maupun bantuan dana. Oleh karena itu perlu ada perhatian dari pemerintah kelurahan berupa strategi-strategi pemberdayaan bagi petani Rumput laut menuju sejahtera.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“STRATEGI PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PEMBERDAYAAN PETANI RUMPUT LAUT DI KELURAHAN LEDEKE KECAMATAN RAIJUA KABUPATEN SABU RAIJUA”**

---

<sup>22</sup>Jurnal muhamad v. endeyani 2009. Identifikasi potensi sumberdaya pesisir dan Laut Pulau Sabu untuk pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Sabu Raijua. partner, tahun 19 nomor 1, hal 44-57

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada lingkup penelitian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana strategi Pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan petani rumput laut Di Kelurahan Ledeke Kecamatan Rajjua Kabupaten Sabu Rajjua?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis strategi Pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan petani rumput laut Di Kelurahan Ledeke Kecamatan Rajjua Kabupaten Sabu Rajjua.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintahan kelurahan agar dapat lebih memperhatikan dan memberdayakan masyarakat petani rumput laut dan bagi masyarakat secara praktis diharapkan dapat memanfaatkan hasil rumput laut untuk mensejahterakan keluarga.
2. Bagi akademisi, diharapkan dapat memberikan khasanah bacaan di lingkungan almamater dan menambah wawasan penulis serta bahan kajian lebih lanjut yang berkenaan dengan strategi pemberdayaan petani rumput laut .
3. Manfaat teoritis, penelitian ini dapat merupakan sebagai informasi selanjutnya bagi peneliti selanjutnya.